



---

**KAMPANYE #IBELONG UNHCR DALAM MEMBANTU MENGAKHIRI ISU  
STATELESSNESS DI KIRGIZSTAN**

**Medina Azahara**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*One of the fundamental rights that humans have is the right to have nationality. When someone is granted a nationality by a country, he or she has been fully recognized by that country which will automatically protect the other rights that they have. However, there are many people who still do not have a nationality, known as statelessness. In 2019, among developed and developing countries that are still experiencing difficulties to end this issue, Kyrgyzstan became the first country in the world that successfully end statelessness through a campaign issued by UNHCR, #IBELONG, in 2014. The author obtains data through literature study such as journals, books, reports of international organizations, websites, and international news. This research is a qualitative research using the process-tracing method in conducting data analysis. By using institutionalism theory, this research argues that Kyrgyzstan's success in ending statelessness is driven by the cooperation between the Kyrgyz government and UNHCR through #IBELONG Campaign and its supporting program where the awareness of civil society increases and then moves together in carrying out legal advocacy to stateless people in various regions of Kyrgyzstan which then had a major influence in ending the issue of statelessness.*

*Key Words: Human Rights, Nationality, Statelessness, UNHCR, Campaign*

## PENDAHULUAN

Setiap orang berhak untuk memiliki kewarganegaraan. Ketika seseorang telah diberikan kewarganegaraan oleh suatu negara maka ia telah diakui sepenuhnya oleh negara tersebut yang secara otomatis akan melindungi hak-hak yang dimilikinya. Kewarganegaraan sendiri merupakan salah satu hak asasi manusia yang mendasar. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Ayat 1 pada tahun 1948 bahwa setiap orang memiliki hak atas kewarganegaraan. Kerangka dalam hak asasi manusia sendiri dibentuk atas dasar gagasan kesetaraan, kebebasan dan martabat dimana setiap orang memegang hak-hak dasar karena kita adalah manusia. Namun, dalam praktiknya, beberapa dari hak dasar tersebut hanya akan didapatkan oleh mereka yang diakui oleh negaranya. Terdapat dua Perjanjian Internasional inti mengenai *statelessness*, yaitu Konvensi terkait Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954 yang berisi tentang kerangka perlindungan untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan serta Konvensi Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan 1961 yang berisi tentang standar internasional dalam menghindari dan mengurangi situasi *statelessness* (ISI, 2014).

Hingga tahun 2018, diperkirakan sebanyak 12 juta orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (UN News, 2018). Dengan tidak memiliki kewarganegaraan, salah satu hak asasi yang dimiliki orang tersebut tidak terpenuhi. Situasi *statelessness* selain memiliki dampak bagi individu yang mengalaminya juga berdampak pada hubungan internasional termasuk di dalam isu perdamaian dan keamanan dimana situasi ini kemudian dapat memicu permasalahan yang menyangkut dengan kedua isu tersebut. Ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan maka dampak yang dirasakan terbatas pada individu tersebut dan keluarganya. Namun, ketika sebuah komunitas menjadi *stateless* dapat mendorong terjadinya pemindahan paksa ke negara-negara lain yang kemudian akan menyebabkan ketegangan regional bahkan internasional (Siddika, 2019). Perselisihan mengenai kewarganegaraan, kebangsaan, dan kepemilikan tersebut kemudian akan menghambat upaya dalam membangun perdamaian dunia.

Pada tahun 2014, UHNCR telah membentuk dan meluncurkan kampanye global, #IBELONG, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat internasional serta menghentikan isu statelessness di seluruh penjuru dunia (Divers, 2014). Pemerintah Kirgizstan dan UNHCR mencatat sebanyak 13.700 orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di dalam negara yang dahulu merupakan bagian dari Uni Soviet ini (UNICEF, 2019). Di tengah kesulitan negara-negara maju untuk mengakhiri isu ini, pada tahun 2019 yang lalu, Kirgizstan tercatat sebagai negara pertama yang berhasil mengakhiri isu statelessness yang tercatat di negaranya yang ditandai dengan pemberian sertifikat kelahiran serta paspor kepada 50 orang terakhir yang tidak memiliki kewarganegaraan dan secara resmi membuat mereka menjadi warga negara Kirgizstan (UNHCR, 2019). Kirgizstan telah menjadi negara pertama yang berhasil menemui tenggat waktu dari program global UNHCR untuk mengakhiri isu *statelessness* ini (Batha, 2019).

Penelitian ini kemudian dibuat dengan menggunakan sumber bacaan rujukan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mark K. Brewer dan Sue Tunner (2019) menyimpulkan bahwa agar suatu negara dapat berhasil untuk mengakhiri isu *statelessness*, terutama pada anak-anak, secara global memerlukan kesadaran, keterlibatan, serta aksi nyata. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Caia Vlieks, Ernst H. Ballin, dan Maria J. R. Vela (2017) menekankan pada pemenuhan hak asasi manusia dibalik kewarganegaraan sebagai tujuan utama dalam mencari solusi untuk isu *statelessness* yang berarti dalam pencarian solusi secara umum dibutuhkan perhatian lebih kepada faktor-faktor lain. Kedua penelitian tersebut kemudian hanya memberikan gambaran secara umum mengenai solusi atau langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi isu *statelessness* di suatu negara. Dengan begitu, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan penerapan dari solusi atau langkah yang dapat dilakukan melalui kerja sama yang tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga organisasi internasional, khususnya di negara Kirgizstan, dalam mendorong keberhasilannya menjadi negara pertama di dunia dalam mengakhiri isu *statelessness* di negaranya.

## **KERANGKA TEORI**

Penelitian ini akan menggunakan teori institusionalisme untuk menganalisis isu yang dibawa. Teori institusionalisme beranggapan bahwa baik institusi domestik maupun internasional memiliki peran yang penting dalam menjalin kerja sama dan menjaga kedamaian antar negara (Johnson & Heiss, 2018). Institusionalisme pertama kali dicetuskan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye dan telah berkembang sejak abad ke-20. Pandangan ini menekankan pada peran dari tujuan bersama yang ada dalam sistem internasional serta kemampuan dari organisasi internasional itu sendiri dalam mendorong negara untuk saling bekerja sama (Baylis & Smith, 2005). Pandangan ini berpendapat bahwa aturan serta institusi dapat memberikan fasilitas yang saling menguntungkan baik itu di dalam maupun antar negara dimana tujuan sosial dari institusionalisme sendiri adalah untuk mempromosikan efek yang menguntungkan dalam keamanan, kesejahteraan, serta kebebasan manusia sebagai hasil dari dunia yang damai dan bebas (Keohane, 2012). Teori ini berargumen bahwa untuk dapat menciptakan perdamaian di dalam urusan dunia, negara harus saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kerja sama sendiri muncul atas dasar adanya kepentingan bersama dan timbal baliknya.

Selain itu, kaum institusioanalisis juga berfokus pada rezim internasional yang dimana menurut Stephen Krashner merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, serta proses pengambilan keputusan secara implisit dan eksplisit dimana harapan para aktor bertemu dalam hubungan internasional (Young, 1986). Rezim internasional sendiri memiliki fungsi untuk membantu negara-negara menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dimana rezim internasional sendiri hadir dengan tujuan untuk menciptakan solusi dalam penyelesaian masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh negara. Menurut Keohane, rezim internasional bersifat fungsionalis dalam memberikan fasilitas kepada negara-negara untuk melakukan negoisasi dimana rezim menjadi sesuatu yang efektif agar kerja sama antar negara dapat dengan lebih mudah tercipta melalui koordinasi yang kolektif serta kerja sama yang efektif (Keohane, 1984).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan menggunakan metode process-tracing yang dapat digunakan dalam menganalisis antar kasus kausal yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam terhadap dinamika kausal serta

menjelaskan mekanisme kausal yang menghubungkan sebab dan akibat dari suatu kasus serupa (Beach, 2017). Metode ini akan menyusun semua data yang terkumpul dan disusun berdasarkan waktu terjadinya suatu kasus yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya UNHCR bersama dengan Kirgizstan melalui kampanye #IBELONG dalam mendorong Kirgizstan menjadi negara pertama yang berhasil dalam mengakhiri isu *statelessness* di negaranya.

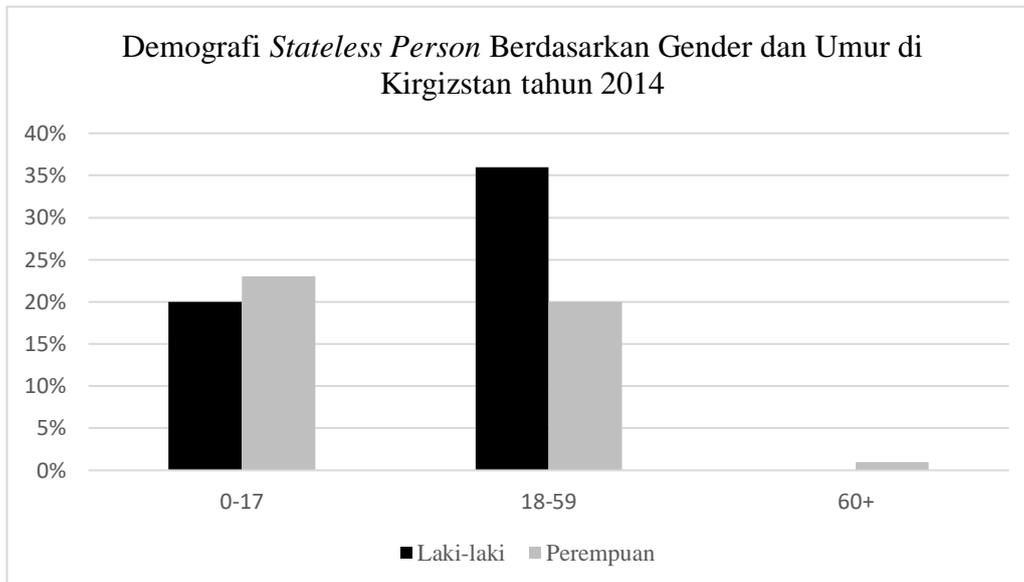
## **PEMBAHASAN**

### **STATELESSNESS DI KIRGIZSTAN**

Tidak dapat dipungkiri isu *statelessness* sendiri ditemukan hampir di seluruh negara. Dimulai dari diskriminasi gender, terdapat celah dalam hukum nasional suatu negara, konflik hukum antar negara, perampasan kewarganegaraan, migrasi, hingga pengungsian. Selain itu, suksesi suatu negara juga dapat menjadi salah satu penyebab yang dapat memunculkan isu *statelessness* ini. Isu *statelessness* di Kawasan Asia Tengah sendiri rata-rata disebabkan karena adanya diskriminasi setelah adanya suksesi negara pasca Uni Soviet pecah dimana setidaknya terdapat 60 juta orang di wilayah Asia Tengah yang kehilangan kewarganegaraannya (ISI, 2017). Kirgizstan merupakan salah satu negara yang dahulu berada di bawah kepemimpinan Uni Soviet. Sebagai negara yang baru saja berdiri pada masa itu, pemerintahan Kirgizstan masih terbilang sangat lemah terutama di dalam hukum serta ekonomi negaranya. Perpecahan Uni Soviet membagi beberapa wilayah yang kemudian menjadi negara-negara yang memiliki kedaulatannya masing-masing. Munculnya negara-negara yang baru merdeka ini kemudian tidak jarang menimbulkan perselisihan mengenai batas antar negara. Hal ini kemudian mendorong munculnya isu *statelessness* di wilayah tersebut dimana mengakibatkan kewarganegaraan yang masih tidak pasti yang mendorong masyarakat masuk ke dalam limbo politik dan hukum (Ashurov, 2019).

Ketika Uni Soviet pecah, migrasi di kawasan Asia Tenggara pun kemudian meningkat. Perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan Kirgizstan pun kemudian menyebabkan banyak masyarakat yang gagal untuk menukarkan paspor Uni Soviet yang lama menjadi paspor baru yang dikeluarkan oleh Kirgizstan (Ashurov, 2019). Penerapan hukum baru pada saat itu masih memiliki banyak kesenjangan terutama di

dalam hukum kewarganegaraan Kirgizstan. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 12.133 orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di wilayah Kirgizstan



Grafik 1.1 Demografi *stateless person* berdasarkan gender dan umur di Kirgizstan tahun 2014

Sumber: Database *Refugee* UNHCR, 2014

Dari 12.133 orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, berdasarkan dengan data yang tercatat oleh UNHCR, pada Gambar 2.1 dijelaskan sebanyak 56% orang diantaranya merupakan laki-laki dan 44% lainnya merupakan perempuan. Diantara 56% laki-laki yang tidak memiliki kewarganegaraan, 20% diantaranya masih anak-anak dengan rentang umur 0-17 tahun dan 36% lainnya merupakan orang dewasa dengan rentang umur 18-59 tahun. Sedangkan 44% perempuan yang tidak memiliki kewarganegaraan terbagi menjadi 23% anak-anak dengan rentang umur 0-17 tahun, orang dewasa sebanyak 20% dengan rentang umur 18-59 tahun, dan lansia sebanyak 1%.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNHCR (Landinfo, 2013), diidentifikasi bahwa orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Kirgizstan yang diantaranya merupakan **(1) mantan pemegang paspor Uni Soviet yang tidak menukar paspor mereka** dimana penerapan hukum baru pada saat itu

masih memiliki banyak kesenjangan terutama di dalam hukum kewarganegaraan Kirgizstan. Di tahun 1994, Kirgizstan menggunakan hukum kewarganegaraan dimana pemerintah Kirgizstan akan memberikan kewarganegaraan secara otomatis bagi orang-orang yang memiliki tempat tinggal lama yang terdaftar di teritori Kirgizstan (propiska atau stempel residensi). mereka mengajukan permohonan kewarganegaraan di negara bagian lain (Refugees International, 2007). Bagi orang-orang yang tidak memiliki propiska atau stempel residensi maka kewarganegaraan tidak diberikan namun harus mengajukan permohonan. Namun, proses permohonan diajukan dengan daftar persyaratan yang banyak dan tidak konsisten serta penundaan dan sistem suap yang dilakukan oleh otoritas menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan kewargaan pada masa itu (Refugees International, 2007). **(2) kelompok etnis Lyuli** yang telah berada di wilayah Asia Tengah sebelum Uni Soviet pecah dan tidak jarang bermigrasi ke wilayah lain dimana sebagian besar dari mereka mengadaptasi gaya hidup nomaden. Di Kirgizstan, kelompok Lyuli hidup di Desa Jany-Kyshtak yang berada di wilayah Ferghana Valley, tepatnya di Provinsi Osh (Erkinov, 2019). **(3) border brides** yang merupakan sebutan bagi perempuan Uzbekistan yang menikah dengan laki-laki Kirgizstan dimana pernikahan ini sering terjadi di daerah perbatasan. Perempuan tersebut tidak mengetahui bahwa diharuskan untuk untuk mendaftarkan diri di Kedutaan Uzbekistan yang ada di kota Bishkek dimana hal ini menyebabkan paspor miliknya kemudian tidak berlaku lagi setelah 5 tahun (EurasiaNet, 2012). Hal ini kemudian menyebabkan pemerintah Kirgizstan tidak dapat memberikan izin tinggal yang dapat membantu mereka mendapatkan status sebagai imigran atau kewarganegaraan Kirgizstan. **(4) anak-anak dari orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan** dimana berdasarkan hukum yang berlaku pada saat itu hanya anak-anak yang ayahnya memiliki kewarganegaraan yang dapat menjadi warga negara Kirgizstan dimana mereka yang terlahir dari ibu dengan kewarganegaraan Kirgizstan atau lahir di tanah Kirgizstan tetap harus mengajukan permohonan kewarganegaraan (Refugees International, 2007).

Isu *statelessness* kemudian memiliki dampak negatif jangka panjang yang signifikan bagi kehidupan orang-orang yang mengalaminya. Karena tidak adanya pengakuan dari negara, orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan pun tidak memiliki dokumen legal yang digunakan untuk mengakses hak-hak yang dimiliki bagi setiap warga negara. Pada kenyataannya ketika seseorang tidak memiliki

kewarganegaraan, ia pun akan kurang mendapatkan kesempatan, perlindungan, serta dalam melakukan partisipasi dimana ia kemudian menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam menjalani hidupnya (ISI, 2014). Mereka kesulitan untuk masuk sekolah, mengakses layanan kesehatan, mendapatkan pekerjaan yang tetap, membeli atau mewarisi rumah, mendaftarkan bisnis yang dibangun, mendaftarkan kendaraan bermotornya, mendapatkan akta kelahiran, izin mengemudi, paspor, sertifikat pernikahan atau sertifikat kematian, membuka rekening bank dan melakukan peminjaman, dan mendapatkan jaminan sosial serta dana pensiun (ISI, 2014).

Biasanya mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan juga memiliki ruang gerak yang sempit dimana mereka tidak dapat berpergian secara bebas. Untuk melakukan migrasi atau berpergian ke luar negara pun sulit dilakukan bahkan ke tempat dimana mereka lahir kecuali secara ilegal yang dimana sangat berbahaya (ISI, 2014). Hal tersebut kemudian dapat menyebabkan dampak jangka panjang yaitu penahanan orang-orang *stateless* atau penahanan arbitral yang merupakan dampak langsung ketika terdapat penghuni serta seseorang memasuki sebuah negara secara ilegal dan negara tersebut berusaha untuk memindahkan mereka ke negara lain atau ketika negara tersebut berupaya untuk mempertanyakan dan memastikan identitas orang tersebut termasuk kewarganegaraannya (UNHCR, 2012).

Situasi ini pun juga berdampak bagi anak-anak dimana mereka kesulitan untuk mendapatkan perlindungan terutama dalam eksploitasi dimana anak-anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan di bawah undang-undang tenaga kerja anak (Lynch & Teff, 2009). Tidak dimilikinya kewarganegaraan kemudian juga dapat membahayakan keselamatan anak-anak dimana mereka rawan terhadap penculikan, adopsi ilegal, eksploitasi seksual, dan *trafficking* serta ketidakmampuan anak-anak tersebut untuk membuktikan bahwa mereka masih di bawah umur untuk masuk ke dalam militer (UNHCR, 2012).

## **IMPLEMENTASI KAMPANYE #IBELONG OLEH KIRGIZSTAN PADA TAHUN 2014 - 2019**

Dalam penelitian ini, kerja sama yang dilakukan oleh UNHCR dan Kirgizstan dalam mengakhiri isu *statelessness* di negaranya melalui kampanye #IBELONG sendiri

dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu, diluncurkannya kampanye #IBELONG. Fase kedua, yaitu bagaimana pemerintah Kirgizstan kemudian melakukan internalisasi terhadap kampanye #IBELONG di negaranya. Dan terakhir yaitu, fase ketiga yang menjadi *output* atau hasil dari kerja sama tersebut.

**Fase pertama** dimulai ketika UNHCR, sebagai rezim internasional, memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas untuk membantu negara-negara menyelesaikan isu yang tengah dihadapinya dengan meluncurkan kampanye #IBELONG. Fasilitas tersebut kemudian digunakan sebagai wadah untuk melakukan kerja sama antar negara, organisasi internasional, masyarakat sipil, atau aktor-aktor lainnya dimana kerja sama sendiri hadir karena adanya kepentingan bersama, yaitu untuk mengakhiri isu *statelessness*. Negara tidak lagi dibiarkan sendiri dalam menentukan bagaimana menemukan dan menyelesaikan isu *statelessness* ini (Batchelor, 2019). Kampanye #IBELONG diluncurkan pada peringatan ke 60 tahun dibentuknya Konvensi terkait Status Orang Tanpa Kewarganegaraan tahun 1954, tepatnya pada tahun 2014, yang ditujukan untuk mengakhiri isu *statelessness* dalam kurun waktu 10 tahun (ECRE, 2014). Kampanye #IBELONG memiliki pesan utama dimana setiap orang yang ada di planet memiliki hak untuk menjadi bagian dari suatu negara melalui kewarganegaraan (Belton, 2016). Negara Kirgizstan kemudian menjadi salah satu diantara beberapa negara pertama dimana kampanye ini diluncurkan. Mulai dari advokasi, penggalangan dana, edukasi hingga komponen multimedia yang disediakan, kampanye ini dibentuk untuk mendukung baik pemerintah Kirgizstan maupun UNHCR beserta dengan institusi-institusi lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi dari isu *statelessness* itu sendiri serta menggerakkan kepedulian masyarakat untuk membantu orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Selain kesadaran dari masyarakat mengenai isu *statelessness* serta pentingnya menyelesaikan isu tersebut, kesadaran pemerintah mengenai pentingnya isu *statelessness*. Bagi pemerintah, isu *statelessness* menjadi salah satu isu yang penting dan harus diselesaikan untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan negara Kirgizstan dimana pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting (Kabar, 2020).

Bersamaan dengan diluncurkannya kampanye #IBELONG, UNHCR juga mengeluarkan *Global Action Plan (GAP) to End Statelessness 2014-2024* diluncurkan sebagai kerangka kerja strategis yang di dalamnya terdapat 10 aksi sebagai pedoman kerangka kerja untuk mencapai tujuan utama dari kampanye #IBELONG. Prinsip serta aturan yang ada kemudian mengurangi ketidakpastian negara dalam mengambil tindakan yang tepat dalam upaya menangani isu *statelessness* itu sendiri. GAP sebagai kerangka kerja yang menjadi bagian dari kampanye #IBELONG kemudian menjadi patokan dari negara-negara dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri isu *statelessness* di negaranya masing-masing. Dalam menetapkan dan mengembangkan 10 aksi GAP, UNHCR telah melakukan konsultasi kepada negara-negara, masyarakat sipil, dan organisasi internasional sebelumnya. 10 aksi GAP tersebut meliputi, **Aksi 1** mengatasi situasi *statelessness* yang ada, **Aksi 2** memastikan bahwa tidak ada anak yang terlahir tanpa berkewarganegaraan, **Aksi 3** menghilangkan diskriminasi gender dalam hukum nasional, **Aksi 4** mencegah penolakan, kehilangan atau perampasan kewarganegaraan atas dasar diskriminasi, **Aksi 5** mencegah munculnya *statelessness* dalam kasus suksesi negara, **Aksi 6** memberikan status perlindungan kepada imigran yang tidak memiliki kewarganegaraan dan memfasilitasi naturalisasinya, **Aksi 7** memastikan pendaftaran kelahiran dalam rangka pencegahan *statelessness*, **Aksi 8** mengeluarkan dokumen kewarganegaraan kepada mereka yang memiliki hak, **Aksi 9** menyetujui Konvensi UN mengenai *Statelessness*, dan **Aksi 10** meningkatkan kuantitas dan kualitatif data populasi yang tidak berkewarganegaraan (UNHCR, 2014).

**Fase kedua** berlangsung setelah kampanye #IBELONG diluncurkan pemerintah Kirgizstan kemudian bersama dengan UNHCR mengadopsi *National Action Plan 2014* yang telah diperbarui sebagai bentuk implementasi dari kampanye #IBELONG dan GAP dimana dari 10 Aksi GAP negara dapat mengambil beberapa poin yang relevan terhadap situasi *stateless* di negaranya. Kirgizstan sendiri berfokus dalam Aksi 1, 2, dan 7. Selanjutnya UNHCR bersama dengan *State Registration Service*<sup>1</sup> (SRS) Kirgizstan

---

<sup>1</sup> *State Registration Services* (SRS) Kirgizstan merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kirgizstan pada tahun 2009 dengan wewenang atas pendaftaran akta status sipil dan tempat tinggal, penerbitan kartu identitas dan dokumen perjalanan, pendaftaran hak real estat dan pemeliharaan kadaster tanah, penerbitan STNK, SIM, serta arsip catatan kependudukan negara.

dan partner NGO melaksanakan *pilot project*, yaitu *Seeds for Solutions* dimana proyek ini dilakukan dengan menggunakan metode “*door-to-door*” dengan tujuan untuk mengidentifikasi, melakukan advokasi hukum, serta membantu orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Proyek tersebut dimulai di beberapa wilayah Kirgizstan, meliputi Kota Osh, Provinsi Osh dan Jalal-abad, serta tiga distrik di Provinsi Chuy dimana dibentuk sebanyak 28 tim fungsional keliling yang dilengkapi dengan kendaraan serta perlengkapan teknis, termasuk laptop, alat fotokopi dan cetak, kamera, serta formulir kewarganegaraan dan pencatatan sipil (UNHCR, 2018). Setiap tim beranggotakan seorang pengacara, seorang asisten, dan perwakilan dari petugas paspor lokal dimana mereka bekerja mengunjungi setiap wilayah dan desa serta bekerja sama dengan penduduk lokal. Proyek ini terus berjalan hingga tahun 2016 dimana total sebanyak 68 fungsional tim keliling bekerja di seluruh negara yang juga telah mencakup seluruh wilayah Kirgizstan.

Selanjutnya dalam konsultasi NGO yang dilakukan secara rutin disebutkan bahwa salah satu caranya adalah bagaimana masyarakat sipil juga dapat bergerak untuk ikut serta dalam mengimplementasikan GAP. Sehingga tepat pada tanggal 9 Juni 2016, Kirgizstan bersama dengan negara-negara di Kawasan Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan membentuk *Central Asia Civil Society Network on Statelessness* (CANS) yang dibantu oleh UNHCR (UNHCR, 2016). Anggota CANS sendiri terdiri dari 11 NGO yang bekerja di 5 negara Asia Tengah dimana terdapat 3 NGO dari Kirgizstan di dalamnya, yaitu Klinik Hukum ‘Adilet’, *Women Entrepreneurs Support Association* (WESA), dan *Ferghana Valley Lawyers Without Borders* (FVLWB). Pembentukan jaringan masyarakat sipil dalam skala regional di kawasan Asia Tengah tersebut menjadi salah satu langkah besar yang diambil dalam upaya penyelesaian isu *statelessness* dimana pembentukan jaringan ini dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Kontribusi dari masyarakat sipil menjadi salah satu hal yang dapat mendorong penyelesaian isu *statelessness* dimana melalui jaringan tersebut kerja sama yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan masyarakat sipil bersama dengan pemerintah dan UNHCR akan memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian isu ini.

Upaya dalam mengakhiri isu *statelessness* tidak berhenti sampai disitu saja, kampanye serta advokasi yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian isu *statelessness* di negara Kirgizstan. Namun, langkah lebih lanjut juga ditempuh dalam upaya mengakhiri isu ini di Kirgizstan. Salah satu isu yang menyebabkan adanya situasi *statelessness* sendiri adalah karena adanya kesenjangan hukum. Oleh karena itu, masyarakat sipil terus melakukan kegiatan untuk melobi perubahan serta meningkatkan undang-undang untuk mengurangi keadaan *stateless* kepada pemerintah yang kemudian memberikan dampak dibukanya akses untuk naturalisasi sejumlah besar orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Ashurov, 2019). Selanjutnya, sebuah Kelompok Kerja di Kirgizstan terkait isu kewarganegaraan yang terdiri dari UNHCR, Kantor Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri, Layanan Pendaftaran Negara, dan ahli-ahli dari NGO kemudian melakukan tinjauan terhadap hukum kewarganegaraan serta isu-isu yang ada dalam pengimplementasiannya (UNHCR, 2017). Dalam tinjauan yang dilakukan kemudian ditemukan beberapa kesenjangan dalam hukum kewarganegaraan Kirgizstan khususnya dalam pendaftaran kelahiran serta dalam perlindungan untuk mencegah anak-anak yang lahir dan tinggal di wilayah Kirgizstan menjadi *stateless*. Hal ini kemudian menyebabkan adanya reformasi dari beberapa hukum Kirgizstan, yaitu hukum mengenai “Status Hukum Orang Asing di Kirgizstan”, dan proses pencatatan sipil dalam bidang pencatatan kelahiran serta pencegahan *statelessness* (UNHCR, 2019).

Kemudian, mendekati titik tengah dari berjalannya kampanye #IBELONG pada tahun 2019, koalisi antara UNHCR dan UNICEF dibentuk, yaitu Koalisi Hak Kewarganegaraan Tiap Anak<sup>2</sup> mengadakan kampanye informasi publik melalui pameran yang disebut “*Invisible Children*” yang berlangsung di Bishkek pada 1 Februari 2019 (UNHCR, 2019). Instalasi transparan berbentuk anak yang berdiri dengan kotak di bawah kaki berisi pesan-pesan yang dipamerkan di berbagai tempat

---

<sup>2</sup>Koalisi Hak Kewarganegaraan Tiap Anak UNHCR-UNICEF dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan, memperluas, dan memperkuat kerja sama internasional dalam meningkatkan kesadaran dalam isu *statelessness* anak serta untuk mempromosikan hak setiap anak untuk memperoleh kewarganegaraan.

umum utama di Bishkek sebagai bentuk dukungan serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sipil mengenai pentingnya pencatatan kelahiran setiap anak sebagai hak dasar mereka (UNICEF, 2019). Pada 7 Oktober 2019, *High-Level Segment on Statelessness* diadakan oleh UNHCR sebagai titik tengah berjalannya kampanye #IBELONG yang kemudian memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk menyampaikan pencapaian mereka hingga saat itu serta menyampaikan ikrar dari negara, organisasi internasional dan regional, serta organisasi masyarakat sipil untuk diimplementasikan selama paruh kedua kampanye #IBELONG (UNHCR, 2020). Kirgizstan sendiri berikrar dalam upaya mengakhiri isu *statelessness* dengan memberikan komitmennya untuk mengadopsi regulasi dalam menentukan status hukum orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (Aksi 6 GAP), memastikan pendaftaran dan dokumentasi kelahiran dengan memberikan sertifikat kelahiran kepada anak-anak yang tidak memiliki sertifikat tersebut (Aksi 7 GAP), membawa hukum nasional Kirgizstan dalam pendaftaran kelahiran sesuai ke dalam standar internasional untuk memastikan setiap anak yang lahir di Kirgizstan terdaftar (Aksi 7 GAP), dan mempelajari pengalaman dari negara-negara anggota Konvensi 1954 dan 1961 (Aksi 9 GAP) (UNHCR, 2020).

**Fase ketiga** menjadi hasil dari kerja sama yang telah dilakukan oleh UNHCR dan Kirgizstan pada 2014-2019. Sebelumnya telah disebutkan bahwa melalui proyek awal *Seeds for Solutions* sendiri yang berjalan dari tahun 2014 hingga 2017, telah diidentifikasi sebanyak total 13.700 orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Kirgizstan. Hasil yang signifikan pun terlihat dari kerja sama yang terus dilakukan pada tahun 2014 hingga 2019 di Kirgizstan.

Tabel 1.1 Jumlah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Kirgizstan tahun 2014-2019

Tahun	Jumlah Orang yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan di Kirgizstan
2014	12.133
2015	9.118

2016	2.334
2017	855
2018	548
2019	58

Dalam Tabel 1.1 terlihat bahwa setiap tahunnya, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2019, jumlah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan terus berkurang secara signifikan. Jumlah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam tabel tersebut merupakan jumlah yang berada di teritori Kirgizstan (UNHCR, 2019). Berkurangnya jumlah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut menjadi dampak dari berjalannya kampanye #IBELONG di Kirgizstan. Tepat pada tanggal 4 Juli 2019, Kirgizstan menjadi negara pertama yang berhasil mengakhiri isu *statelessness* yang diketahui di negaranya yang ditandai dengan pemberian sertifikat kelahiran dan paspor kepada 50 orang terakhir, diantaranya terdapat 15 anak-anak, yang tidak memiliki kewarganegaraan menjadikan mereka warga negara Kirgizstan dalam upacara yang diselenggarakan di ibu kota Kirgizstan, Bishkek (Batha, 2019). Kirgizstan menjadi negara pertama yang kemudian berhasil menemui tenggat waktu dari kampanye #IBELONG dan program-programnya.

Keberhasilan ini pun didorong atas adanya koordinasi yang kolektif serta kerja sama yang efektif antara pemerintah Kirgizstan, UNHCR, NGO, serta masyarakat sipil yang ikut bergerak bersama dalam mencapai tujuan bersama. UNHCR, sebagai rezim internasional, telah memberikan fasilitas tidak hanya bagi negara-negara untuk melakukan kerja sama dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama. UNHCR memberikan wadah bagi negara-negara untuk mengatasi isu *statelessness* melalui kampanye #IBELONG dengan didorong oleh program-program pendukungnya dalam mencapai tujuannya. Tanpa adanya koordinasi yang kolektif serta kerja sama yang efektif, isu *statelessness* akan sulit untuk diselesaikan. Kesadaran dari pemerintah Kirgizstan serta masyarakat sipil akan pentingnya penyelesaian isu *statelessness* sendiri menjadi salah satu kunci utama dalam menyelesaikan isu ini. Tanpa adanya kesadaran dari pemerintah serta masyarakat sipil, kerja sama tidak akan mungkin berjalan. Kampanye #IBELONG mengajak masyarakat sipil serta pemerintah Kirgizstan untuk lebih peduli terhadap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan meningkatnya kesadaran akan urgensi dari permasalahan tersebut, kemauan untuk

membantu dan mengakhiri isu ini pun juga ikut meningkat. Kemudian, dengan menggunakan kerangka kerja GAP sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat baik itu pemerintah Kirgizstan, NGO, UNHCR, serta masyarakat sipil dalam mengambil tindakan untuk mengakhiri isu *statelessness* itu sendiri. Proyek kampanye dan advokasi yang telah dilakukan secara “*door-to-door*” oleh Kirgizstan menjadi bukti dari keseriusan dalam mencapai tujuan akhir dari kampanye #IBELONG.

## **DAMPAK KAMPANYE #IBELONG TERHADAP ISU *STATELESSNESS* DI KIRGIZSTAN**

Kampanye #IBELONG menjadi jalan keluar bagi warga di Kirgizstan untuk mendapatkan kewarganegaraan mereka. Dengan kampanye ini, tentu saja berdampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat sipil akan arti pentingnya sebuah kewarganegaraan bagi kesejahteraan serta kualitas hidup mereka. Dengan dimilikinya kewarganegaraan, mereka kemudian akan mendapatkan hak-hak dasar bagi setiap manusia sehingga nantinya akan membuka peluang-peluang yang ada baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun peluang lainnya untuk memajukan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Dimilikinya kewarganegaraan oleh seseorang berarti bahwa orang tersebut diakui keberadaannya oleh suatu negara. Dengan demikian, orang tersebut selain mendapatkan pengakuan akan mendapatkan perlindungan dari suatu negara. Kerja sama yang dilakukan oleh UNHCR dan Kirgizstan sendiri telah memberikan dampak dalam upaya penyelesaian isu *statelessness* di negaranya. Dampak dari kampanye #IBELONG sendiri kemudian dirasakan oleh mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Salah satu dari mereka yang merasakan dampak dari program kampanye #IBELONG itu adalah keluarga Nazir, salah satu keluarga yang merupakan bagian dari komunitas Lyuli di Kirgizstan, yang merasakan dampak dari kampanye ini. Nazir yang memiliki keinginan untuk bekerja di bidang medis merupakan salah satu remaja dari komunitas Lyuli. Sebelumnya Nazir beserta keluarganya tidak memiliki kewarganegaraan yang dimana hal ini menyebabkan Nazir tidak dapat mendapatkan pendidikan yang baik sehingga Nazir tidak dapat mengejar impiannya untuk bekerja di bidang medis (Bond, 2019). Kampanye serta advokasi hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil bersama dengan UNHCR dan pemerintah Kirgizstan kemudian

menjangkau wilayah serta komunitas-komunitas terpencil, seperti komunitas Lyuli tersebut yang kemudian membantu mereka untuk mendaftarkan dokumen dan kewarganegaraannya. Pada awal tahun 2019, Nazir beserta keluarganya dibantu dan mendapatkan kewarganegaraan dimana mereka kemudian pada akhirnya mendapatkan hak-hak dasar seperti mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Sanabar, ibu dari Nazir, mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa melakukan hal tersebut tanpa bantuan dari pengacara yang menjadi bagian dari program Kirgizstan bersama dengan UNHCR tersebut karena keterbatasan ekonomi (Bond, 2019).

Selain Nazir, Sevilia Mamedova juga merasakan dampak dari kampanye ini. Sevilia sendiri merupakan seorang pelajar dan merupakan seorang atlet yang mewakili Kirgizstan dalam acara olahraga. Sebelumnya tidak mengetahui apakah ia bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena ia tidak memiliki dokumen-dokumen kewarganegaraan. Pada masa itu ia dapat bersekolah karena orang tuanya meyakinkan administrasi sekolahnya untuk tetap bisa bersekolah hingga kelas 9 tetapi setelahnya kesulitan mulai muncul dimana untuk mendaftarkan ujian akhir ia membutuhkan paspor (UNHCR, 2020). Pada tahun 2016, pengacara-pengacara dari Klinik Hukum 'Adilet' yang merupakan salah satu organisasi anggota CANS dan juga merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang ikut dalam program kampanye dan advokasi hukum bersama pemerintah Kirgizstan dan UNHCR kemudian membantu Sevilia menyelesaikan isu dokumennya dimana setelah Sevilia mendapatkan dokumennya ia dapat mengejar mimpinya menjadi anggota tim nasional Kirgizstan dalam ajang olahraga di Tashkent (UNHCR, 2020).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari penjelasan penelitian di atas, peneliti kemudian kesimpulan, yaitu keberhasilan Kirgizstan dalam menangani kasus *statelessness* di negaranya didorong atas adanya kerja sama yang terjadi antara pemerintah Kirgizstan dan UNHCR dimana UNHCR, sebagai rezim internasional, memberikan fasilitas kepada negara untuk melakukan kerja sama melalui kampanye #IBELONG. Kampanye #IBELONG beserta dengan kerangka kerja GAP dan program-program pendukungnya menjadi wadah bagi negara, NGO, serta masyarakat sipil bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kampanye #IBELONG, kesadaran pemerintah Kirgizstan serta

masyarakat sipil mengenai urgensi dari isu *statelessness* meningkat. Meningkatnya kesadaran pemerintah dan masyarakat sipil kemudian meningkatkan kemauan dan tekad untuk menyelesaikan isu ini. Hal tersebut kemudian mendorong masyarakat sipil untuk ikut bergerak bersama pemerintah Kirgizstan bersama dengan UNHCR. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya proyek “*Seeds for Solutions*” sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan bersama dari kampanye #IBELONG dimana masyarakat sipil bersama dengan pemerintah Kirgizstan dan UNHCR bergerak dengan menggunakan metode “*door-to-door*” mengunjungi desa-desa yang terpencil bahkan wilayah pegunungan untuk melakukan identifikasi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, melakukan advokasi hukum, serta membantu orang-orang tersebut untuk mendaftarkan dan mendapatkan kewarganegaraannya. Dilakukannya koordinasi yang kolektif serta kerja sama yang efektif oleh pemerintah Kirgizstan bersama dan masyarakat sipil dengan bantuan UNHCR kemudian membuahkan hasil dimana Kirgizstan berhasil menjadi negara pertama yang berhasil mengakhiri kasus *statelessness* yang diketahui di negaranya pada 2019. Hal tersebut menjadi pencapaian yang besar dimana Kirgizstan menjadi negara pertama yang berhasil menemui tenggat waktu dari kampanye #IBELONG.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, UNHCR sebagai institusi internasional memiliki peran yang penting dalam melakukan kerja sama untuk menangani isu *statelessness*. Fasilitas serta pedoman yang diberikan oleh institusi internasional untuk melakukan kerja sama cukup efektif dalam menangani permasalahan yang ada di suatu negara. Negara tidak lagi dibiarkan sendiri dalam menyelesaikan isu yang dihadapinya dimana fasilitas serta pedoman tersebut mempermudah negara dalam mengambil langkah yang tepat agar permasalahan di negaranya dapat terselesaikan. Meskipun begitu, peran pemerintah tetap menjadi hal yang penting dalam upaya mengakhiri isu *statelessness* di Kirgizstan dimana tanpa adanya *political will* dari pemerintah Kirgizstan, keberhasilan tersebut akan sulit untuk dicapai.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos, M.A. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. selaku dosen pembimbing 2 dan Prof. Dr. Dra. Ari Pradhanawati, M.S. selaku dosen penguji

yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- Ashurov, A. (2019, February 28). *Tackling Statelessness in Kyrgyzstan and the Wider Central Asia Region - The Importance of Networking*. Diambil kembali dari European Network on Statelessness: <https://www.statelessness.eu/updates/blog/tackling-statelessness-kyrgyzstan-and-wider-central-asia-region-importance-networking>
- Batchelor, C. (2019). Assessment of the #IBELONG Campaign Mid-Point and the High-Level Segment on Statelessness. *The Statelessness & Citizenship Review*, 1(2), 307-314.
- Batha, E. (2019, Juli 5). *Kyrgyzstan makes history as it ends plight of last 'legal ghosts'*. Diambil kembali dari Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-kyrgyzstan-stateless-un/kyrgyzstan-makes-history-as-it-ends-plight-of-last-legal-ghosts-idUSKCN1TZ1ZF>
- Baylis, J., & Smith, S. (2005). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Beach, D. (2017, Januari 25). *Process Tracing Methods in the Social Sciences*. Diambil kembali dari Oxford Research Encyclopedias: <https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-176;jsessionid=13FEF913870DD0D4E088E998B84FB82B>
- Belton, K. (2016, Desember 8). Ending Statelessness Through Belonging: A Transformative Agenda? *Ethics & International Affairs*, 30(4), 419-427.
- Bond, K. (2019, Oktober 8). *Once a dream, citizenship puts medical career within reach*. Diambil kembali dari UNHCR: <https://www.unhcr.ca/news/stateless-once-dream-citizenship-puts-medical-career-within-reach/>
- Brewer, M., & Tunner, S. (2019). Solving Child Statelessness: Disclosure, Reporting, and Corporate Responsibility. *Sciendo*, 8(1), 83-105. doi:<https://doi.org/10.2478/bjals-2019-0003>
- Divers. (2014, November 4). *UNHCR launches 10-year global campaign to end statelessness*. Diambil kembali dari UNHCR The UN Refugee Agency: <https://www.unhcr.org/news/latest/2014/11/545797f06/unhcr-launches-10-year-global-campaign-end-statelessness.html>
- ECRE. (2014, November 6). *UNHCR Launches the "I Belong" Campaign to End Statelessness Within 10 Years*. Diambil kembali dari October 2021, from

- European Council on Refugees and Exiles: <https://ecre.org/unhcr-launches-the-i-belong-campaign-to-end-statelessness-within-10-years/>
- Erkinov, U. (2019, July 7). *Kyrgyzstan: For Marginalized Lyuli, Kyrgyz Language is an Antidote to Isolation*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=printdoc&docid=4a8414f5c>
- EurasiaNet. (2012, Februari 21). *The Stateless 'Border Brides' of Central Asia*. Diambil kembali dari The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/international/archive/2012/02/the-stateless-border-brides-of-central-asia/253360/>
- ISI. (2014). *The World's Stateless*. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
- ISI. (2017). *The World's Stateless Children*. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
- Johnson, T., & Heiss, A. (2018). Liberal Institutionalism. In T. Weiss, & R. Wilkinson (Eds.), *International Organizations and Global Governance* (2 ed., pp. 123-124). London: Routledge.
- Kabar. (2020, Juli 27). *Kyrgyzstan became one of states to eliminate statelessness*. Diambil kembali dari KABAR: <http://en.kabar.kg/news/kyrgyzstan-became-one-of-states-to-eliminate-statelessness-1/>
- Keohane, R. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Keohane, R. (2012). Twenty Years of Institutional Liberalism. *International Relations*, 26(2), 125-138.
- Landinfo. (2013). *Kyrgyzstan: Passports and ID documents*. Norwegia: Landinfo.
- Lynch, M., & Teff, M. (2009, April). Childhood Statelessness. *Forced Migration Review*(32), 31-33.
- Popov, V., & Marushiakova, E. (2015). Central Asian Gypsies: Identities and Migrations. *Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa / Nationalities Affairs. New Series*(46), 1-22.
- Refugees International. (2007, Desember 20). *Kyrgyz Republic: Powerful neighbors imperil protection and create statelessness*. Retrieved from Reliefweb: <https://reliefweb.int/report/kyrgyzstan/kyrgyz-republic-powerful-neighbors-imperil-protection-and-create-statelessness>
- Siddika, B. (2019, Desember). Impact of Statelessness: Are We Ready to Face? *Open Journal of Social Sciences*, 7(12), 1-11.
- UN News. (2018, November 12). *'12 million' stateless people globally, warns UNHCR chief in call to States for decisive action*. Retrieved from UN News: <https://news.un.org/en/story/2018/11/1025561>

- UNHCR. (2012, Oktober 1). *Self-Study Module on Statelessness*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/50b899602.html>
- UNHCR. (2014, November 4). *Global Action Plan to End Statelessness*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/545b47d64.html>
- UNHCR. (2016, Juli). *Campaign Updates, July 2016*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&docid=579a1b554&skip=0&publisher=UNHCR&querysi=Campaign%20Update%202016&searchin=title&sort=date>
- UNHCR. (2017, April). *Campaign Update, April 2017*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/58eb44564.html>
- UNHCR. (2018, April 3). *Preventing and reducing statelessness in the Kyrgyz Republic*. Diambil kembali dari Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=E93nLfGvWHQ>
- UNHCR. (2019, Maret). *Campaign Update, January-March 2019*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/5ca5bfc77.html>
- UNHCR. (2019, Juli 2019). *Kyrgyzstan ends statelessness in historic first*. Diambil kembali dari UNHCR: <https://www.unhcr.org/news/press/2019/7/5d1da90d4/kyrgyzstan-ends-statelessness-historic-first.html>
- UNHCR. (2020, Mei). *High-Level Segment on Statelessness: Results and Highlights*. Diambil kembali dari Refworld: <https://www.refworld.org/docid/5ec3e91b4.html>
- UNHCR. (2020, Juni 9). *Previously stateless Sevilia, who recently obtained Kyrgyz citizenship, wants to represent Kyrgyzstan abroad*. Diambil kembali dari UNHCR Central Asia: <https://www.unhcr.org/centralasia/en/12129-previously-stateless-sevilia-who-recently-obtained-kyrgyz-citizenship-wants-to-represent-kyrgyzstan-abroad.html>
- UNICEF. (2019, Februari 1). *In Kyrgyzstan as much as 18,000 children are invisible*. Diambil kembali dari UNICEF: <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/kyrgyzstan-much-18000-children-are-invisible>
- UNICEF. (2019, Juli 4). *Kyrgyzstan to become the first stateless-free country in the world*. Diambil kembali dari UNICEF: <https://www.unicef.org/kyrgyzstan/press-releases/kyrgyzstan-become-first-stateless-free-country-world>
- Vlieks, C., Ballin, H. E., & Vela, M. J. (2017). Solving statelessness: Interpreting the right to nationality. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 35(3), 158-175.
- Young, O. (1986, Oktober). Review: International Regimes: Toward a New Theory of Institutions. *World Politics*, 39(1), 104-122.